

# Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia

Oleh Yahya A. Muhaimin

*Secara kualitatif dan kuantitatif kelas menengah pada masa Orde Baru diduduki oleh kaum pedagang dan pengusaha nasional swasta asli. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah anggota KADIN, HIPMI dan asosiasi-asosiasi lain. Menurut Yahya A. Muhaimin, pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai kelas menengah sangat bergantung pada pemegang kekuasaan politik, sehingga posisi mereka lebih merupakan "partner" ketimbang sebagai "pengimbang" atau "pengontrol" terhadap birokrasi dan pemerintah. Hal ini merupakan refleksi dari sistem patrimonialisme dan paternalisme masyarakat.*



## Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah negara Indonesia—kecuali bagi sekelompok kecil anggota masyarakat—pembicaraan mengenai "kelas menengah" nampaknya tidak begitu menarik. Dari satu segi, hal itu merupakan satu refleksi bahwa peranan "kelas menengah" sebagai konsepsi Barat tidak dianggap penting di Indonesia; atau paling tidak "kelas menengah" ini dalam perkembangan sosial, politik dan ekonomi tidak pernah berada pada posisi yang dominan, dan bahkan senantiasa berada pada kedudukan yang tidak menentu.

Dari segi lain, hal itu juga amat berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia—termasuk kelompok elit—amat dijiwai oleh idealisme yang ingin membangun Indonesia menjadi satu masyarakat sosialis, bukan masyarakat kapitalistis yang secara historis telah menumbuhkan kelas menengah di Barat. Tambahan lagi pada prinsipnya konsep "kelas menengah" dianggap tidak cocok dan tidak bisa diterapkan dalam masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya selalu meletakkan nilai-nilai keharmonisan dan gotong royong di atas segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep "kelas menengah", prinsip-prinsip berupa

individualisme, kompetisi, dan independensi (mandiri) secara intrinsik berada pada tempat yang amat sentral.

Pada masa Orde Baru, seirama dengan perubahan masyarakat akhir-akhir ini, peranan dan kedudukan kelompok menengah mendapat perhatian yang semakin besar. Dan tulisan ini akan membicarakan beberapa dimensi kelas menengah di Indonesia, terutama kelas menengah di daerah dalam kaitannya dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Di sini dapat dikemukakan, bahwa pada prinsipnya kedudukan dan peranan kelas menengah di daerah identik sekali dengan mereka yang berada di tingkat nasional. Tetapi mereka yang berada di daerah nampak lebih independen (otonom, mandiri) dan lebih terbatas dalam hubungannya dengan peranan negara (pemerintah dan birokrasi).

## Sejarah Perkembangan di Barat

Ada beberapa hal penting mengenai esensi peranan kelas menengah menurut sejarah timbulnya di Barat. *Pertama*, kelas menengah merupakan kekuatan dalam masyarakat (negara) yang diperlukan untuk mengontrol dan mengimbangi kekuasaan penguasa (raja dan kelas ningrat tuan tanah) yang feodalis-

tis. Dengan kekuatan ekonominya, kelompok menengah ini berusaha mengendalikan kesewenang-wenangan kelas atas terhadap golongan bawah; berusaha mengubah kebiasaan dan norma-norma yang terlalu menguntungkan kelompok ningrat dan tuan tanah, menjadi norma yang lebih adil, manusiawi dan rasional; serta berusaha agar peraturan-peraturan yang dibuat untuk anggota masyarakat mencerminkan partisipasi masyarakat seluas mungkin. Dengan kata lain, tatanan sosial masyarakat feodal (*Stände*) yang didasarkan atas kepemilikan tanah melalui kelas menengah ini diubah menjadi tatanan yang "demokratis".<sup>1</sup>

Kedua, kelas menengah timbul di Barat berkaitan erat dengan *Reformasi* dan *Revolusi Industri*, yaitu berkaitan erat dengan nilai-nilai kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang ada pada kelompok-kelompok agama tertentu. Kelompok ini merupakan basis kekuatan timbulnya kelas menengah dan mesin pendorong utama bagi proses modernisasi di Barat.<sup>2</sup>

Ketiga, dan ini berkaitan langsung dengan yang kedua, bahwa inti dari kelas menengah adalah kelompok pedagang dan pengusaha,<sup>3</sup> yaitu mereka yang memiliki faktor-faktor produksi, atau yang memproduksi barang-barang. Kaum pedagang ini—paling tidak untuk kepentingan analisa biasa—ditempatkan dalam satu kelompok dan "dilawankan" dengan kaum buruh, kaum tuan tanah serta aristokrat.

Dalam sejarah perkembangannya di Barat kelas menengah ini juga mencakup kelompok petani, pegawai yang menerima gaji

1 Barrington Moore Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Boston, Mass.: Beacon Press, 1967, paperback), hal. 414-415; Dalam tulisan ini Moore berpendapat, ada tiga alternatif pokok sebagai "jalan" menuju masyarakat modern, yaitu "demokrasi Barat", "fasisme," dan "komunisme," dan di sini golongan petani merupakan elemen yang paling menentukan untuk perkembangan modernisasi.

2 Lihat dalam S.N. Eisenstadt (ed.), *A Comparative View: The Protestant Ethic and Modernization* (New York: Basic Books, Inc., 1968), hal. 135-149.

3 Kaum pedagang dan pengusaha biasa disebut pula kaum borjuis yang dalam masyarakat Indonesia masih saja mempunyai konotasi "buruk" sebab diasumsikan sebagai "kaum pemeras" terhadap kaum kelas bawah.

dari pemerintah atau dari lembaga swasta tertentu, dan golongan profesional seperti dokter, pengacara, artis filem dan lain-lain. Namun unsur esensial dalam kelas menengah ini, di samping mereka mempunyai penghasilan yang relatif besar, mereka juga merupakan orang-orang yang terdidik, dinamis, dan partisipasinya dalam masyarakat disadari sebagai sesuatu yang amat penting.

Stereotipe pemikiran mengenai kelas menengah adalah bahwa golongan ini diperlukan dalam masyarakat sebagai *moderating factor* dan guna "menjembatani" antara kelas atas dengan kelas bawah. Dengan demikian, maka suatu tindakan yang radikal dan ekstrim dapat dihindarkan dalam proses perubahan masyarakat. Namun apa yang terjadi di berbagai negara berkembang menunjukkan, bahwa kelas menengah merupakan golongan yang paling radikal dan revolusioner, terutama di beberapa negara Amerika Latin. Di situ golongan "kelas menengah" terutama terdiri dari kaum cendekiawan, perwira-perwira militer dan kaum profesional. Namun sifat revolusioner mereka akan semakin berubah setara dengan semakin bertambah besarnya jumlah mereka dalam masyarakat sehingga akhirnya menjadi golongan konservatif, yang menikmati fasilitas-fasilitas dari lembaga-lembaga birokrasi dan bisnis. Karena itu kelas menengah (di Amerika Latin dan beberapa negara Asia) naik ke panggung politik bukan lewat kegiatannya sebagai *entrepreneur* namun melalui perlindungan kelompok militer.<sup>4</sup> Dari sini dapat disimpulkan, bahwa posisi dan peranan kelas menengah amat berbeda bila kita membandingkannya dengan masyarakat Barat dan Amerika Latin.

## Kelas Menengah pada Masa Penjajahan

Peranan kelas menengah di Indonesia nampak tidak seperti yang dikonsepsikan

4 Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968), hal. 201 dan hal. 288-304; mengenai peranan kelas menengah, lihat juga Irma Adelman & Cynthia Morris, *Economic Growth & Social Equity in Developing Countries* (Stanford, California: Stanford University Press, 1973), hal. 132-133.



oleh pemikir Barat. Pada masa penjajahan Belanda, kedudukan kelas menengah ditempati oleh kelompok pengusaha Belanda, terutama kelompok "Sepuluh Besar" (Borsumij, Lindeteves NV, Internatio, Jacobson van den Berg, G. Wehry, Harmsen & Verwey, Deli Atjeh NV, M.H., Mirondolle en Voute, dan Reis Coj.) di tingkat atas, dan pedagang-pedagang Cina di tingkat bawah sebagai kelas menengah bawah. Dalam konstruksi struktur sosial yang diciptakan oleh Belanda, peranan golongan menengah tidak lebih daripada sekedar memenuhi kepentingan kolonialisme Belanda sebagai penguasa. Bahkan kelompok Cina, di samping merupakan golongan perantara antara kolonial Belanda dengan penduduk asli, juga digunakan oleh kaum ningrat untuk mengambil keuntungan dari rakyatnya.

Di beberapa daerah, terutama di Sumatera dan Jawa bagian utara muncul beberapa kelompok "kelas menengah" dari penduduk asli, termasuk pedagang-pedagang muslim yang bergabung dalam Sarekat (Dagang) Islam. Sebenarnya mereka merupakan tonggak kelas menengah seperti di Barat, sebab kegiatan ekonomi dan politik mereka merupakan kekuatan pengontrol (*countervailing forces*) terhadap pemerintah kolonial dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai *entrepreneurship* dalam arti sebenarnya. Tetapi kelas menengah asli yang jumlahnya amat sedikit itu tidak dapat hidup terus di bawah sistem ekonomi kolonial Belanda. Karena itu sampai akhir masa penjajahan, kelas menengah di Indonesia terdiri dari golongan pedagang Cina serta pengusaha-pengusaha besar Belanda yang menguasai sepenuhnya perekonomian Indonesia. Beberapa gelinir orang Indonesia seperti golongan intelektual dan pemimpin perjuangan—yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kelas menengah—ternyata peranannya sebagai kelas menengah hampir tidak ada artinya. Hal itu terutama terlihat sesudah kemerdekaan Indonesia. Dari sini bisa kita katakan bahwa sejarah timbulnya kelas menengah di Indonesia bukanlah dari kekuasaan golongan aristokrasi tuan tanah. Tumbuh serta hidupnya kelas menengah lebih banyak bergantung pada kemurahan hati penguasa kolonial Belanda.

Pada masa-masa pertama sesudah kedaulatan Indonesia diakui oleh dunia internasional dan Belanda, pemerintah Indonesia menyadari, bahwa struktur perekonomiannya tidak menguntungkan bagi pembangunan nasional. Artinya bahwa kelas menengah yang ada merupakan warisan dari zaman kolonial yang sepenuhnya dikuasai oleh para penguasa dan pedagang Belanda, serta beberapa bangsa Eropa lainnya di tingkat atas dan golongan Cina di tingkat bawah. Struktur perekonomian itu oleh pemerintah Indonesia dengan penuh ambisi dan antusias ingin diubah guna menumbuhkan kelas menengah dari golongan asli. Usaha tersebut terutama jelas sekali terlihat sewaktu pemerintah melancarkan kebijaksanaan ekonomi yang terkenal dengan sebutan *Program Benteng* sebagai bagian terpenting dari "Rentjana Urgensi Perekonomian" pemerintah yang secara resmi dilaksanakan sejak Maret 1951.

Dalam kerangka Program Benteng, pemerintah Indonesia mengharapkan tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dari golongan penduduk asli yang harus menguasai sektor perdagangan dan industri, sementara pemerintah akan tetap menguasai cabang-cabang industri berat, dan modal asing diberi kesempatan "membantu" kegiatan golongan asli pada sektor industri yang "tidak penting".<sup>5</sup> Namun sampai pertengahan kedua tahun 1950-an, ternyata yang tumbuh dan berkembang bukanlah kelas pengusaha asli yang kuat sebagaimana dikonsepsikan oleh Program Benteng, dan akhirnya rencana pemerintah tersebut gagal total.

*Pertama*, karena faktor *party politics* dan sifat patrimonialisme masyarakat, sehingga pemerintah tidak selektif dalam memberikan kredit dan hak-hak istimewa kepada golongan asli. Hampir seluruh "pengusaha" yang mendapatkan kredit dan keistimewaan usaha perdagangan bukanlah yang memiliki

5 Irma Adelman & Cynthia Morris, *ibid.* hal. 22-23 menyebutkan pentingnya mengembangkan kelas menengah dari golongan asli (*indigenous*) yang umumnya akan mengembangkan proses pertumbuhan ekonomi secara luas. Perlu dikemukakan di sini, karena kaburnya rumusan "penduduk/warga negara asli" dalam Program Benteng, maka umumnya diterima sebagai pegangan bahwa golongan Cina dikategorikan satu kelompok dengan bangsa Belanda dan orang asing lainnya.

keahlian berwiraswasta serta mempunyai jiwa *entrepreneurship*, tetapi hanya yang dekat atau mempunyai hubungan tertentu-dengan penguasa. Ini berarti bahwa "Penguasa Benteng" itu sebenarnya tidak mempergunakan kredit dari pemerintah sebagai modal pokoknya namun akses (*access*) ke kekuasaan merupakan modalnya. Akibatnya para pengusaha dan pedagang dalam arti kata sebenarnya terpendal dan tidak mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah, hanya karena tidak mempunyai hubungan atau akses kepada kekuasaan politik, baik mungkin lewat partai politik, aparat birokrasi, maupun hubungan famili.

Kedua, kegagalan pemerintah diperhebat dengan tumbuhnya pengusaha dan perusahaan yang disebut "Ali-Baba".<sup>6</sup> Dalam jaringan kegiatan ekonomi seperti ini, "pengusaha" asli yang telah mendapatkan hak dan kredit dari pemerintah berusaha menjualnya kepada golongan Cina. Di sini, orang asli yang dikonsepsikan oleh Program Benteng akan tumbuh menjadi kelas menengah yang kuat, ternyata hanya menjadikan dirinya sebagai "tameng" belaka, sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha ekonominya adalah orang Cina tersebut; orang Indonesia asli tersebut berperan hanya sebagai *straw-man* atau *front-man*. Dari sinilah timbul istilah buruk dalam dunia bisnis di Indonesia yang disebut dengan *Dummy Industries* atau *Dummy Company* pada pengusaha asli. Kemudian pada masa Orde Baru, *Dummy Company* itu digunakan bukan hanya pada perusahaan yang di permukaannya atas nama orang Indonesia asli dan di belakangnya orang Cina, tetapi juga yang di belakangnya adalah kekuatan modal asing dari kelompok multinasional (MNC).

Dari pembicaraan di atas, kita bisa mengetahui bahwa pada sejak masa sesudah kemerdekaan, pemerintah telah gagal membina,

6 Istilah "Ali-Baba" timbul pada waktu itu; "Ali" biasa digunakan sebagai nama orang Islam santri untuk menunjukkan orang asli, sedangkan "Baba" (atau tepatnya "Babah", dari kata "Wa Wa Tse") untuk menunjukkan orang Cina. Mungkin juga istilah itu timbul berkaitan dengan ceritera Ali Baba dari Timur Tengah yang pada saat itu sedang populer. Atau mungkin pula istilah itu berkaitan dengan nama "Kabinet Ali" di mana tumbuhnya pengusaha "Ali Baba" mencapai titik paling tinggi.

apalagi mengembangkan kelas pengusaha yang kuat, dinamis, dan otonom dalam bidang politik. Yang terjadi hanyalah terbentuknya suatu kelas yang merupakan aliansi dari pemegang kekuasaan politik atau kalangan birokrat dengan "pengusaha swasta". Kelas ini timbul dan berkembang berkat proses penyalahgunaan kekuasaan politik atau komersialisasi jabatan politik dan birokrasi, yang kemudian tumbuh di Indonesia dengan sebutan kelas menengah, yang pada awal-awal pertumbuhannya terdiri dari orang-orang kaya baru. Istilah "orang kaya baru" ini identik dengan istilah *neuer Mittelstand* (kelas menengah baru) di Jerman yang terdiri dari para pejabat birokrat dan pegawai-pegawai pada perusahaan swasta yang kaya.

Kelompok *neuer Mittelstand* di Jerman pada hakekatnya bukanlah kelas menengah, tetapi "proletariat", dan kedudukan sosialnya bergantung pada kemampuannya "menjual" tenaga serta kekuasaan birokratisnya. Namun sebenarnya mereka merupakan golongan profesional, dan dalam kerangka konsep Marxis kegiatan mereka dalam birokrasi tidak menghasilkan *surplus value* (nilai lebih)—satu elemen "pemerasan" yang selalu dilakukan oleh "kaum borjuis" terhadap "kaum proletar." Karena itu kelompok di Jerman tersebut berbeda prinsip dengan kelas "orang kaya baru" di Indonesia, sebab kelas menengah baru di Indonesia terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan wewenang politik—satu hal yang amat diametralkan dengan pertumbuhan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik yang sehat.

Di sini, dalam konteks sistem patrimonial, masing-masing mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, tidak rasional serta tidak legal. Akibat, partai-partai politik atau kekuatan politik serta aparat birokrasi di Indonesia sama sekali tidak bisa melakukan fungsi sebagai penyalur kepentingan umum serta alat yang melayani urusan serta kepentingan secara lancar. Pemimpin dan penguasa partai serta pejabat birokrasi di sini bertindak sebagai *patron* yang secara otomatis diterima oleh anggota masyarakat sebagai pihak "atasan" yang merasa mempunyai hak untuk membagi-bagikan rezeki-politik dan ekonomi kepada *client* atau bawahan-nya.



## Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama, terjadi perubahan dan penggantian pemegang kekuasaan politik. Proses hubungan politik-bisnis yang bersifat simbiotik mutualistik tetap berlangsung dalam kerangka "sosialisme Indonesia". Yang berubah adalah *patron* dan *client*-nya, sedangkan hakekatnya tetap. Yang dijalankan dalam bisnis bukanlah modal dalam pengertian ekonomi, tetapi berupa kekuasaan politik yang disirkulasikan dengan uang. Pada masa Orde Lama ini watak patrimonialisme masyarakat menonjol dengan jelas. Kekuasaan politik dan pemerintahan yang dipegang penguasa dipandang sebagai haknya secara alamiah, dan kekuasaan itu diyakini benar sebagai sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan anggota masyarakat yang sebenarnya merupakan pemberi kekuasaan itu. Pandangan seperti ini menyebabkan penguasa merasa tidak mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya. Hubungan dalam bidang politik menjadi amat personal. Di sini, *client* (anak buah) yang pada masa sebelum Orde Lama telah menikmati keuntungan ekonomi dan politik, tetapi kemudian kehilangan *patron* (bapak) sebagai tempat bergantung, maka dia akan terpelanting ke luar dan kehilangan hak-hak ekonomi-politiknya, kecuali bila dia berhasil menjadi "anak buah" dari penguasa yang baru.

Dari uraian di atas tampak bahwa peranan pengusaha sebagai kelas menengah di hadapan penguasa dan birokrasi, tidak ada. Dan walaupun ada peranan itu sangat terbatas. Kelas menengah di samping secara kuantitas amat terbatas, dia juga tidak dinamis.

Pada masa Orde Baru, sekalipun pemerintah melaksanakan sistem perekonomian pasar terbuka, peranannya tetap besar, dan semakin besar dalam bidang politik dan ekonomi. Melalui peraturan yang ada, pemerintah dapat menentukan dan menyeleksi siapa saja yang perlu diberi kredit atau izin usaha, baik dengan usaha sendiri maupun dengan memanfaatkan modal asing sebagai rekanan (*partner*) asing. Hal ini dilakukan dalam lingkungan sistem politik yang masih tetap berwatak patrimonial seperti pada masa sebelumnya dan masa kerajaan Jawa

sebelum penjajahan Belanda.<sup>7</sup> Faktor-faktor seperti itu ditambah dengan adanya kecenderungan yang kuat pengusaha nasional swasta untuk selalu bergantung pada fasilitas serta "perlindungan" pemerintah. Kebanyakan mereka *by nature* bukanlah kelompok yang mampu berkompetisi dalam bidang ekonomi, tidak mau menanggung resiko dalam arti kata sebenarnya sebagaimana lazimnya kaum *entrepreneur*. Mereka—kaum pengusaha nasional swasta—baru bisa bergerak pada sektor-sektor yang jelas memberikan kepastian tidak akan memberikan resiko ekonomi, namun memberikan jaminan yang pasti menguntungkan. Dengan kata lain, setor-sektor yang kompetitif serta membutuhkan kreativitas dan keahlian *entrepreneurial* dan "tidak dimanjakan" oleh pemerintah, tidak menarik pengusaha-pengusaha nasional yang tumbuh dan berkembang pada masa Orde Baru. Karena itu bisa dipahami mengapa kelas menengah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada masa Orde Baru ini adalah kelas menengah dari kalangan pengusaha dan pedagang yang tidak sama dengan yang dikonsepsikan di Barat.

Kelas menengah pada masa Orde Baru di samping terdiri dari pedagang dan pengusaha swasta tersebut di atas, juga terdiri dari pengusaha yang aktif dalam perusahaan sektor negara dan beberapa kalangan pegawai dan pejabat pemerintah. Beberapa kalangan intelegensia atau intelektual telah tumbuh pula menjadi kelas menengah dengan memanfaatkan kondisi ekonomi dan politik yang ada, antara lain modal asing. Mereka juga tumbuh sebagai "orang kaya baru", dan banyak dari mereka sebetulnya merupakan pegawai dan pejabat negara.

Golongan Cina pada hakekatnya juga tetap tumbuh sebagai kelas menengah, baik merupakan *upper middle class* maupun *lower middle class*. Namun sebagian besar dari kalangan Cina ini pada esensinya berada di luar sistem sosio-kultural masyarakat Indonesia, di samping pola operasi dan kegiatan usaha mereka pada dasarnya tidak

7 Beberapa sifat patrimonialisme dalam hubungannya dengan sistem politik pada masa pemerintahan Sukarno dan Orde Baru diuraikan dengan jelas dalam Harold Crouch, "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia," *World Politics*, Vol. XXXI, No. 4, July 1979, hal. 571-587.

banyak berubah dari pola yang ada sejak zaman Program Benteng. Karena itu, dari kalangan Cina ini lebih sulit lagi diharapkan munculnya pemikiran-pemikiran dan inisiatif alternatif untuk perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang diperlukan bagi pembaruan dan pembangunan. Dari kalangan atau kelompok profesional, seperti para artis sebenarnya telah tumbuh pula kelas menengah *periphery* (pinggiran) dan demikian pula dari kalangan para petani kaya. Hanya saja jumlah dari kalangan artis misalnya hanya beberapa gelintir saja sedangkan dari kalangan petani kaya di samping jumlahnya amat sedikit mereka juga tidak mempunyai *empathy* dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga posisi mereka sebagai kelas menengah hampir tidak ada artinya sama sekali.

Dari sini dapat dikatakan bahwa kelas menengah pada masa Orde Baru baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diduduki oleh kaum pedagang dan pengusaha nasional swasta asli.<sup>8</sup> Pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai kelas menengah yang sangat bergantung pada pemegang kekuasaan politik menyebabkan posisi mereka lebih merupakan "partner", bukan "pengimbang" atau "pengontrol" terhadap birokrasi dan pemerintah. Hal ini merupakan refleksi dan sejalan dengan nilai serta sistem patrimonialisme dan paternalisme masyarakat Indonesia.

Dalam jangka pendek fenomena seperti ini memang diperlukan pada tahap-tahap awal pertumbuhan agar para pedagang dan pengusaha mendapatkan rasa aman bagi usaha dan investasi mereka. Namun untuk jangka panjang, golongan kelas menengah semacam ini harus mampu mentransformasikan diri menjadi kelompok yang kuat/mandiri serta mengubah dan melepaskan pola ketergantungan itu. Karena itu diperlukan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai *entrepreneurial* dalam arti sebenarnya, yang sebetulnya berakar pada berbagai kelompok masyarakat. Dengan ini secara gradual mereka menata kembali struktur sosio-

politik yang ada sehingga hambatan struktural baik berupa birokrasi pemerintahan, kekuatan ekonomi asing, maupun semacamnya bisa ditekan sejauh mungkin.

## Konsepsi Weberian

Struktur sosial masyarakat Indonesia secara konseptual dibagi oleh seorang antropolog Amerika, Clifford Geertz, menjadi tiga golongan: kelompok Islam santri, abangan, dan priyayi. Menurut Geertz, kelompok Islam santri inilah yang paling potensial dan memiliki nilai-nilai tertentu untuk mengembangkan diri menjadi golongan *entrepreneur* yang kuat dan mandiri. Golongan ini diharapkan menjadi inti kelas menengah yang amat diperlukan untuk pembangunan dan pembaruan sosial, ekonomi, dan politik serta kebudayaan. Kalau kita melihat sejarah perkembangan kelas menengah di Indonesia sesudah kemerdekaan, maka yang berkembang menjadi pengusaha kelas menengah ternyata adalah dari kalangan abangan dan priyayi birokrat yang menurut konsep Weberian (pegangan Geertz) mereka tidak mempunyai nilai-nilai kultural yang diperlukan sebagai *entrepreneur*.

Hampir semua pedagang dan pengusaha yang berasal dari kalangan abangan dan priyayi tumbuh dan bergerak di sektor-sektor yang "berlemak", tidak kompetitif, tidak menanggung resiko, dan mendapat proteksi perlindungan dari pemerintah. Di samping itu, umumnya mereka juga berkembang karena ditupang fasilitas politik atau oleh keahlian *entrepreneurship* golongan lain. Golongan Muslim santri sendiri dalam lingkungan yang tercipta pada masa Orde Baru hanya beberapa gelintir yang dapat tumbuh dan bertahan di tingkat nasional dengan kekuatan sendiri, atau paling tidak dengan menerima kekuatan "luar" sebagai *senior partners*. Dari sini kita bisa mengatakan, bahwa asumsi Weberian dari Geertz menemukan kenyataan yang berlainan. Sebab yang menjadi "motor" pertumbuhan serta perubahan ekonomi dan sosial—paling tidak dalam jangka pendek—bukan kelas menengah seperti yang dikonsepsikan Barat tetapi kelas menengah yang kadar independensi serta kemampuan kompetitif amat terbatas.

8 Secara normatif, perkembangan golongan menengah pengusaha ini terlihat dari perkembangan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) serta asosiasi lain-lainnya semacam itu, di samping jumlah usaha-usaha dagang.



Hambatan pertumbuhan dan pengembangan usaha kelas menengah dari "santri" (atau kelompok lain yang identik punya nilai *entrepreneurial* seperti Muslim santri) bukan sekedar nilai kultural yang patrimonial, sistem *bazaar* yang "tidak rasional" dan tidak memungkinkan akumulasi modal, tetapi juga faktor struktural yang tidak memungkinkan "golongan santri" ini bersaing melawan kekuatan asing multinasional maupun kekuatan sektor negara serta swasta yang mendapat "hak monopoli."

## Kelas Menengah di Daerah

Kita ingin melihat konteks masalah kelas menengah ini pada perkembangan yang berlangsung di satu daerah yang barangkali relevant untuk dijadikan perbandingan. Daerah yang dimaksud di sini adalah satu kota kecil di Jawa, *kota A*, yang dahulu merupakan kota kawedanan. Daerah sekitar kota ini merupakan daerah pertanian padi yang amat subur, merupakan paru-paru kehidupan perdagangan kota tersebut.

Ada dua hal yang penting untuk disebutkan di sini mengenai kota berpenduduk 30 ribu jiwa dan daerah sekitarnya (seluruh kawedanan berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa).<sup>9</sup> *Pertama*, daerah ini sejak masa revolusi kemerdekaan sampai tahun 1957 merupakan salah satu basis gerakan "Darul Islam" (DI) di Indonesia yang melawan pemerintah. Untuk beberapa lama pemerintah menempatkan tentara secara permanen di kota dalam usahanya menumpas kegiatan DI. Bisa dipahami, bahwa seringkali anggota masyarakat di daerah itu menerima perlakuan yang mereka rasakan "tidak adil" dari pemerintah maupun dari pihak DI.

Pada tahun 1957, dengan suatu upacara resmi, seluruh pasukan DI dan pemimpin mereka menyatakan kembali ke pangkuan Republik. Namun sejak itu sampai beberapa masa sesudah tampilnya Orde Baru, terlihat tendensi yang kuat pada anggota

masyarakat bahwa mereka masih diperlakukan secara "tidak adil" dan "dikucilkan" oleh pemerintah dari gerak kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara "normal". Trauma yang mereka alami pada masa pemberontakan DI dan pasca-DI itu telah menyebabkan sebagian besar anggota masyarakat di daerah itu terutama di kota—merasa kehilangan identitas, atau lebih tepat telah memberikan suasana psikologis yang oleh Hagen disebut *withdrawal of status respect*.<sup>10</sup> Faktor inilah yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan dan tingkah laku tertentu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Dan ini merupakan suatu "penjelasan" mengapa kota A dan daerah sekitarnya kelihatan lesu secara fisik pada masa pemberontakan DI dan masa-masa sesudahnya, namun menunjukkan kegiatan *entrepreneurial* (kewiraswastaan) yang relatif tinggi.

*Kedua*, bahwa hampir seluruh penduduk kota A dan daerah sekitarnya merupakan kelompok sosial yang dalam konsep Geertz disebut golongan santri, dengan segala karakteristiknya. Seperti di daerah-daerah lain, mereka yang tinggal di kota A kelihatan lebih "maju", *affluent*, terdidik, dan *mobile* daripada yang tinggal di pedesaan sekitarnya. Dulu golongan santri ini merupakan tulang punggung kekuatan partai Masyumi dan partai Nahdlatul Ulama. Masing-masing mendapatkan pengikut terutama dari kelompok-kelompok penduduk perkotaan dan para petani kaya serta beberapa daerah pedesaan tertentu; partai Nahdlatul Ulama terutama mendapat dukungan dari daerah pedesaan dan beberapa *segmen* penduduk kota "pinggiran" yang umumnya lebih tradisional.

Sesudah partai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960, hampir seluruh bekas anggota ini aktif melakukan kegiatan sosial dan pendidikan melalui beberapa organisasi lain terutama Muhammadiyah. Dari kalangan bekas anggota Masyumi, dan kemudian pada anggota Muhammadiyah ini, kelihatannya tumbuh para pedagang dan *entrepreneur* yang potensial di kota itu dan sekitarnya.

9 Penduduk kota A tepatnya kini berjumlah 33.761 jiwa, dan dari jumlah itu hanya 253 jiwa yang keturunan Cina. Dalam kecamatan, jumlah penduduknya 83.902 jiwa, dan persentase penduduk Cina semakin kecil lagi, sebab mereka hanya terpusat di kota A.

10 Everett E. Hagen, *On the Theory of Social Change* (Homewood, Ill.: Dorsey Press, 1962), juga tersebut dalam Everett E. Hagen, *The Economics of Development* (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin Inc., 1968).

Hal ini mempunyai korelasi positif dengan menonjol serta berkembangnya lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosial yang dimotori oleh bekas anggota Masyumi dan kalangan Muhammadiyah, yang merupakan pedagang dan petani kaya kelas menengah yang mandiri dan kuat.

Apa yang sebetulnya ingin diutarakan di sini adalah, bahwa di satu daerah telah tumbuh dan berkembang kelas menengah pedagang yang "kuat" berkat motivasi yang dimiliki oleh kalangan tersebut. Motivasi ini lahir dari nilai-nilai kehidupan yang mereka pegang, atau karena merupakan perwujudan dari suasana *status withdrawal*, atau karena keduanya. Tetapi perlu dikemukakan, bahwa perkembangan kelas menengah yang pesat dan "kuat" di daerah tersebut justru terjadi setelah semakin hilangnya (peranan) kalangan pedagang Cina dari situ; suatu fenomena yang berlawanan dengan perkembangan yang terjadi di kota-kota besar atau pada tingkat nasional. Di samping itu, pertumbuhan mereka juga tidak ada sangkut-pautnya dengan fasilitas kekuasaan politik maupun birokrasi seperti yang terjadi di tingkat nasional. Beberapa anggota kelas menengah baru memang timbul di kota A pada awal tahun 1970-an sebagai pemborong dan kontraktor-kontraktor yang menggunakan jalur kekuasaan birokrasi dan politik.

Namun yang menarik adalah, bahwa hanya beberapa dari mereka mampu bertahan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun. Sejak akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980 banyak di antara mereka yang ditupang oleh birokrasi dan kekuasaan politik mengalami kemunduran ekonomi. Ada yang disebabkan oleh hilangnya atau lepasnya "patron politik", ada yang karena mis-managemen (mencampur-adukkan urusan bisnis dan kepentingan keluarga dalam bidang keuangan), karena devaluasi rupiah, dan karena beban *overhead cost* melampaui batas kemampuan ekonomis mereka. Dan sebagaimana pada masa program Benteng, banyak di antara pengusaha yang bergantung pada fasilitas kekuasaan politik itu akhirnya hanya sekedar sebagai "pedagang lisensi" suatu model tipologis dari "masa Benteng". Hanya saja pembeli "lisensi" kali ini bukan hanya orang Cina, melainkan se-

sama "santri" yang tidak mempunyai hubungan dengan kekuasaan politik atau birokrasi, tetapi mempunyai keahlian *entrepreneurial* dan modal yang kuat sendiri.

Melihat perkembangan yang berlangsung di kota A, bisa dikatakan bahwa faktor (peranan) pedagang Cina tidak mempunyai hubungan secara positif dengan kelas menengah yang timbul karena fasilitas politik; model perdagangan "Ali-Baba" tidak terjadi di kota A. Namun hilangnya peranan pedagang dan pengusaha Cina telah menumbuhkan pedagang yang mandiri dan kuat pada anggota masyarakat "asli", dan tidak ada korelasi yang positif antara peranan birokrasi atau kekuasaan politik dengan pertumbuhan kelas menengah pedagang yang independen tersebut. Ini berarti bahwa pedagang Cina di kota A merupakan faktor penghambat perkembangan pedagang dari kalangan asli, sekalipun di sini tidak bisa diketahui secara agak pasti apakah kalangan Cina memiliki keahlian dan motivasi serta nilai *entrepreneurial* yang lebih tinggi daripada kalangan "asli."<sup>11</sup> Ini tidak bisa dipastikan karena kalangan Cina telah menempati kedudukan monopolistis atau strategis sejak penjajahan Belanda, di samping kalangan Cina juga memiliki faktor yang menguntungkan lainnya seperti mereka memiliki solidaritas kuat antar mereka sendiri dalam kegiatan perdagangan, terutama modal dan pengadaan barang, sekalipun mereka berada pada kota yang berjauhan, di samping juga cara-cara dan "moral" berdagang kalangan Cina "lebih bebas" daripada kalangan asli.<sup>12</sup>

Secara kuantitatif jumlah orang Cina di kota A tidak ada artinya dibandingkan jumlah penduduk asli (*vide, santri*). Mereka berjumlah tidak lebih dari 2 persen dari seluruh

11 Istilah "asli" digunakan sekedar untuk mempermudah pembahasan; dalam konteks di kota A dimaksudkan sebagai kalangan "santri".

12 Mengenai solidaritas dan cara-cara perdagangan kalangan Cina seperti ini bisa dibaca dalam George Y. Adicondro, "Dari Pecinan sampai Nan Yang: Suatu Introduksi Tentang Kewiraswastaan Orang Cina di Indonesia," *Prisma*, no. 9, Oktober 1978, hal. 13-29, terutama hal. 21-22. Kalangan santri pada masa Orde Baru ini di kota A pada prinsipnya tidak mengalami perubahan pada segi cara dan moral berdagang, sebab perubahan yang ada kelihatan tidak substansial dan karena faktor struktural.



penduduk kota A, dan hampir seluruhnya tinggal di sepanjang jalan utama kota yang merupakan urat nadi lalu lintas kegiatan perdagangan dan penghubungan dua kota besar yang terletak di sebelah utara dan sebelah selatan kota. Sampai tahun 1959, hanya ada dua pedagang "besar" dari kalangan santri dibandingkan tujuh pedagang "besar" pada kalangan Cina. Dua pedagang "besar" dari santri yang merupakan pendukung partai Masyumi itu bergerak di bidang perdagangan dan industri pemasakan kulit (kambing, sapi, dan kerbau), dan satunya lagi di bidang perdagangan tekstil dan perhotelan di Jakarta. Sedangkan pedagang "besar" Cina menguasai perdagangan tekstil, barang-barang kelontong, alat dan bahan bangunan di luar kayu dan material (toko besi), hasil bumi padi dan palawija, perdagangan perhiasan emas, penyaluran minyak tanah, dan perusahaan transpor bis.

Posisi pedagang dan pengusaha Cina mulai goyah sesudah pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1959 yang melarang orang Cina warga negara asing tinggal di daerah di bawah tingkat kabupaten, sehingga banyak keluarga Cina harus meninggalkan kota A. Posisi kelompok pedagang kelas menengah Cina ini semakin lemah lagi sesudah terjadi perubahan politik akibat pemberontakan "Gerakan 30 September" tahun 1965. Banyak keluarga Cina di kota A merasa tidak aman lagi bila tetap tinggal di situ. Kini jumlah mereka tidak sampai 1 persen dari jumlah penduduk dan hampir semuanya melakukan usaha perdagangan. Namun hanya ada tiga pengusaha atau pedagang Cina yang "besar", yaitu bergerak di bidang alat dan bahan bangunan di luar kayu dan material, barang-barang kelontong, penyaluran minyak tanah dan transpor.

Di pihak lain, perkembangan kelas menengah dari kalangan pedagang dan pengusaha asli yang *tidak* bergantung pada fasilitas kekuasaan politik dan birokrasi mengalami pertumbuhan yang pesat baik secara kuantitatif maupun kualitatif semenjak tahun 1959 dan terutama sejak akhir tahun 1960-an. Jumlah pedagang yang mewakili kelas menengah bagian bawah (*lower middle class*) kelihatan melampaui jumlah seluruh pedagang Cina. Namun yang lebih berarti adalah tum-

buhnya kelas menengah bagian atas (*upper middle class*) untuk tingkat daerah. Mereka bisa disebut sebagai pedagang dan pengusaha "besar" yang mempunyai peranan dalam lalu lintas permodalan dan sirkulasi perdagangan. Mereka bergerak dan menguasai bidang perdagangan hasil bumi padi dan palawija (tujuh pengusaha), bidang perdagangan tekstil (tiga pedagang), alat bangunan bukan kayu dan material (seorang pengusaha), bahan bangunan kayu dan material lainnya (tiga pengusaha), percetakan (satu), perdagangan perhiasan emas (satu), bidang farmasi (satu), bidang transpor (empat), dan perusahaan kulit (satu).<sup>13</sup>

Beberapa pedagang dan pengusaha "besar" ini berasal dari kalangan petani kaya pedesaan yang melakukan migrasi ke kota A. Mereka berasal dari daerah santri yang lebih dekat dengan kultur Sunda yang terletak tujuh kilometer sebelah barat kota A, suatu daerah yang sama suburnya dengan daerah pertanian yang terhampar sebelah timur kota. Jumlah itu tidak termasuk beberapa pengusaha dan pedagang yang kini masih tampak kegiatannya namun mengalami kemunduran ekonom yang substansial akibat mismanajemen dan faktor-faktor nonpolitis lainnya, seperti perpecahan usaha karena warisan sehingga usaha keluarga tersebut mengalami disintegrasi.

Perlu dicatat di sini bahwa sebagian terbesar kalangan kelas menengah pedagang dan pengusaha serta petani kaya di daerah kota A ini pada dasarnya memiliki visi dan kesadaran politik yang tinggi sejak tahun 1960-an; setidaknya-tidaknnya mereka aktif dalam pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan daerah. Terlihat kecenderungan yang kuat sekali di daerah

13 Perdagangan alat bangunan selain material masih tetap dikuasai oleh pedagang Cina seperti halnya barang-barang Kelontong. Sebenarnya ada dua perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan obat, namun yang dimiliki Cina kelihatan tidak bisa bersaing dengan yang dimiliki santri. Ada satu pengusaha "besar" di bidang transpor yang dimiliki oleh kalangan "priyayi". Menurut perkiraan yang "kasar", sirkulasi uang perdagangan pada masing-masing pedagang "besar" itu berkisar antara setengah juta rupiah sampai dengan lima belas juta rupiah setiap hari. Bisa dikatakan bahwa di kota A ini terjadi persaingan yang relatif sehat antar pedagang dan pengusaha.

kota A dan sekitarnya, bahwa kegiatan pembangunan sosial dan pendidikan, baik yang dilola oleh badan dan lembaga-lembaga swasta maupun oleh aparat pemerintah, tidak bisa berjalan lancar *tanpa* partisipasi dari kalangan kelas menengah pedagang dan pengusaha santri.

## Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kelas menengah. *Pertama*, konsep "kelas menengah" pada prinsipnya merupakan konsep yang amat *loose* (longgar) sehingga penerapannya sering menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman konseptional. Ini terlihat pada masyarakat Indonesia yang memiliki pengalaman sejarah yang amat berbeda, serta nilai-nilai kultural yang berlainan dari masyarakat Barat tempat asal mula konsep itu lahir.

*Kedua*, kelas menengah di Indonesia, terutama di tingkat nasional, bukan merupakan suatu kekuatan pengimbang (*counterveiling power*) terhadap birokrasi. Mereka merupakan "partner" dari birokrasi, dan dalam banyak hal malah lebih merupakan "bawahan" kekuatan birokrasi atau penguasa politik.

*Ketiga*, kelas menengah di Indonesia yang kini ada, bukan berasal dari kalangan "santri" sebagaimana diasumsikan oleh Geertz, namun umumnya dari kalangan lain yang mendapat perlindungan politik serta dimotori oleh kelompok modal kuat.

*Keempat*, kelas menengah yang tumbuh di daerah dan pada masa-masa awalnya terlindung dari hambatan struktural ternyata berasal dari kalangan yang mempunyai nilai dan dorongan *entrepreneurial*, dan mampu berkembang menjadi kelompok kelas mene-

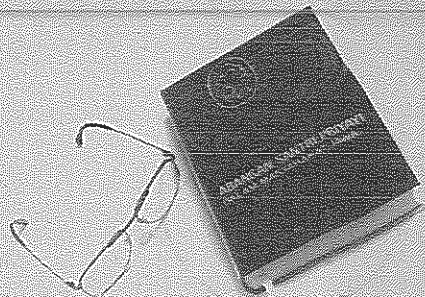
ngah yang otonom dan kuat; suatu kekuatan di dalam masyarakat yang amat vital bagi proses pembangunan yang dinamis dan teratur serta "bersih" untuk jangka panjang.

*Kelima*, perlindungan politis dan ekonomis dari pemerintah pada masa-masa awal pertumbuhan kelas pedagang yang kuat amat diperlukan, terutama untuk pengadaan modal dan perlindungan hasil produksi dengan mekanisme birokrasi yang dinamis, sederhana, dan "bersih". Ini amat esensial terutama untuk "melokalisir" nilai-nilai patrimonial sedemikian rupa sehingga pelaksanaan model pembangunan yang teknokratis tidak banyak menimbulkan akibat-akibat sampingan (*unintended consequences*), yang dalam jangka panjang dapat merusak atau menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

*Keenam*, melihat perkembangan kelas menengah yang otonom, paling tidak di daerah-daerah, maka pengembangan kelas menengah yang amat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik serta kultural tidak bisa dipupuk dari bawah, melainkan harus dari pusat, dengan pengembangan birokrasi yang sehat dan berwibawa serta pelaksanaan hukum dalam arti yang luas. Kalau kini banyak sekali disebut dan disebarakan "model pembangunan Jepang" yang sama-sama mempunyai prinsip hubungan sosial *patron-client*, maka dalam segi kewibawaan dan kebersihan birokrasi serta pelaksanaan hukum, inilah yang kini perlu diberi perhatian. Ada semacam sinisme yang hidup di masyarakat, bahwa di Indonesia kini semuanya serba ada dan serba bisa membangun. Yang kurang adalah: kejujuran, suatu elemen yang berkaitan dengan segi kedisiplinan dan kegairahan *entrepreneurship*.



# Lengkapi Perpustakaan Anda Dengan Buku-Buku Bermutu Kami



Kami, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, asuhan para cendekiawan terkemuka seperti Prof. Dr. Solo Soemardjan, Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Koentjaraningrat, Bur Rasuanto dan lain-lain dengan bantuan The Asia Foundation, menyediakan buku-buku bermutu sesuai dengan harapan Anda.

**Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa**, Clifford Geertz, Pustaka Jaya, Rp 10.000,-.

Gambaran terperinci dan teliti tentang realitas tiga golongan struktur sosial dalam masyarakat Jawa, berbeda dalam nilai namun saling melengkapi. Menurutnya, Abangan lebih memiliki kesamaan dengan 'religi rakyat', Santri dengan pedagang, sedang Priyayi dengan birokrat di kota.

**Kemiskinan Struktural**, Alfian, dek, Pulsar/LP3ES, Rp 2.000,-.

Bukan sekedar kondisi kehidupan dalam 3 siklus: lahir, menderita dan mati, melainkan juga kemiskinan akan kebutuhan pendidikan, perlindungan hukum, komunikasi dan rekreasi. Lebih 50% penduduk Indonesia termasuk di dalamnya. Buku ini berisi gambaran dan argumentasi serta alternatif jalan keluarnya.

**Kritik Asia Terhadap Pembangunan**, Yogash Atal & Ralph Pieris, Pulsar/LP3ES, Rp 2.000,-.

Benarkah kegagalan pembangunan di negeri-negeri Asia Selatan dan Asia Tenggara disebabkan tradisi setempat yang sulit diubah? Tradisi keagamaan, nilai dan struktur sosial begitu kokohnya, sementara susunan tipe ideal tradisional tak memiliki landasan sosial yang realistik. Kritik Asia terhadap 'Pembangunan' berisi makalah-makalah yang memberi pemecahan untuk itu.

**Buku-buku lain yang patut Anda miliki:**

1. **Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan**, Thee Kian Wie, LP3ES, Rp 2.800,-.
2. **Gerakan Modern Islam di Indonesia**, Deliar Noer, LP3ES, Rp 3.750,-.
3. **Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan ...**, James C. Scott, LP3ES, Rp 3.250,-.
4. **Piramida Kurban Manusia**, Peter L. Berger, LP3ES, Rp 3.000,-.
5. **Pendidikan di Indonesia**, C.E. Beeby, LP3ES, Rp 3.000,-.
6. **Kebudayaan Petani Desa Trunyan di Bali**, Dr. James Dananjaya, Pustaka Jaya, Rp 15.000,-.
7. **Cerita Dipati Ukur**, Dr. E. Subardi Ekadjati, Pustaka Jaya, Rp 10.000,-.
8. **Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia**, Hildred Geertz, Pulsar/LP3ES, Rp 2.000,-.
9. **Islam yang Saya Amati**, Clifford Geertz, Pulsar/LP3ES, Rp 2.500,-.
10. **Metodologi Studi Pedesaan di Negara-negara Berkembang**, Lipton & Moore, Pulsar, Rp 2.000,-.

11. **Dualisme Pedesaan di Indonesia dan Cina**, Peter Mc Cauley, Pulsar/LP3ES, Rp 1.000,-.

12. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Mulyanto Sumardi & Hans-Dieter Evers, ed. Rajawali, Rp 4.950,-.

13. **Sosiologi Politik**, Maurice Duverger, Rajawali, Rp 6.700,-.

14. **Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial**, Henry A. Landsberger & Yu. G. Alexandrov, Rajawali, Rp 2.000,-.

15. **Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya**, Buday Prasadja, Rajawali, Rp 2.500,-.

16. **Masyarakat Petani dan Kebudayaan**, Robert Redfield, Rajawali, Rp 2.000,-.

17. **Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa**, Pujiwati Sajogyo, Rajawali, Rp 5.250,-.

18. **Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok, Perilaku Menyimpang**, Mulyanto Sumardi & Hans-Dieter Evers, ed., Rajawali, Rp 4.950,-.

19. **Petani: Suatu Tinjauan Antropologis**, Eric R. Wolf, Rajawali, Rp 2.750,-.

20. **Modernisasi: Masalah Model Pembangunan**, Beling & Totten, Rajawali, Rp 4.500,-.

21. **Sistem Politik Indonesia**, Arbi Sanit, Pulsar/LP3ES, Rp 2.000,-.

22. **Wanita Kota Jakarta: Kehidupan Keluarga dan Keluarga Berencana**, Julita Rabardjo, dek, GMU Press, Rp 1.750,-.

23. **Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau**, Dr. Mochtar Naim, GMU Press, Rp 3.000,-.

24. **Perubahan Sosial di Yogyakarta**, Solo Soemardjan, GMU Press, Rp 3.000,-.

25. **Solidaritas Kekeluargaan dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias-Indonesia**, Bambang Laiya, GMU Press, Rp 1.250,-.

26. **Peradilan Agama Islam di Indonesia**, Daniel S. Lev, Intermasa, Rp 3.800,-.

27. **Agama dan Perubahan Sosial**, Taufik Abdullah, ed. Rajawali, Rp 5.750,-.

Tersedia di toko-toko buku terkemuka di kota Anda. Pesanan buku ke Pulsar dialamatkan ke LP3ES.

YIIS tidak menerima pesanan/melakukan penjualan. Harga bisa berubah sewaktu-waktu.



Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial  
Jl. Propatan 42 Pav, Jakarta Indonesia,  
Tel. 355606 - 343978.

Gunting dan simpan iklan ini. Sewaktu-waktu pasti Anda perlukan.

